

BAGIAN LIMA
PUDARNYA
IDEALISME POLITIK

MASA DEPAN PARTAI ISLAM

Meski menggunakan “simbol” Islam, ternyata tidak sedikit partai politik yang tidak kebal terhadap konflik. Terbaru, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang dilanda konflik internal. Ini terkait laporan Yusuf Supendi, salah satu deklaratör dan pendiri PKS, pada Hilmi Aminudin (Ketua Majelis Syura), Luthfi Hasan Ishaq (Presiden), dan Anis Matta (Sekretaris Jenderal). Tiga elit PKS ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan dugaan penggelapan dana sumbangan calon gubernur DKI Jakarta, Adang Darajatun, pada saat mengikuti pemilihan gubernur 2007. Hilmi Aminuddin juga dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR dengan tuduhan melakukan fitnah.

Pertarungan yang melibatkan elit PKS ini menimbulkan beberapa tafsiran. Internal PKS yang kini sedang berkuasa menuduh Yusuf Supendi diperalat partai politik lain. Targetnya adalah merusak citra PKS. Tapi, tuduhan ini dibantah oleh Yusuf Supendi. Ia menyatakan bahwa langkahnya untuk memerkarakan elit PKS karena murni persoalan kode etik. Sementara kalangan di luar PKS menilai fenomena ini sebagai bentuk pertarungan kelompok idealis versus kelompok pragmatis dalam tubuh PKS. Kelompok idealis ini disebut sebagai faksi keadilan. Sementara kelompok pragmatis yang kini sedang berkuasa di PKS dinamakan faksi sejahtera. Pertarungan dua kelompok ini sesungguhnya telah berlangsung lama. Dalam konteks ini laporan Yusuf Supendi dapat menjadi pembenar adanya faksi-faksi di PKS.

Apa pun motivasi yang melatarbelakangi pelapor, fenomena ini jelas dapat menjadi potret buruk perilaku politisi Muslim.

Yang lebih menyedihkan, dugaan praktik kotor dalam politik ini dilakukan elit PKS yang dicitrakan bersih. Karena perilaku elitnya tidak mencerminkan nilai-nilai moral agama, maka jangan heran jika partai Islam kurang diminati masyarakat. Akibatnya, partai Islam tidak pernah menjadi besar.

Realitas bahwa partai Islam kurang diminati dapat diamati dalam pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilu 2009 memang melahirkan harapan bagi partai Islam melalui perolehan suara PKS. Pada pemilu 2009, PKS berhasil meraih 57 kursi di DPR. Capaian ini mengalahkan partai berplatform Islam (PPP) dan partai berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman (PAN dan PKB).

Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman kurang diminati masyarakat sehingga tidak dapat menjadi besar? Terdapat beberapa alasan yang dapat menjelaskan pertanyaan ini. *Pertama*, perjalanan sejarah umat Islam Indonesia selalu diwarnai munculnya kecenderungan militerisasi. Akibatnya, umat Islam mengalami trauma politik yang luar biasa karena harus berhadapan dengan kolaborasi kekuasaan dan kekuatan militer.

Fenomena ini dapat diamati pada awal era Orde Baru hingga pertengahan 1980-an. Pada masa itu banyak tokoh Muslim yang menjadi korban politik kekuasaan Orde Baru melalui isu “Komando Jihad”. Kondisi ini kemudian turut membentuk lahirnya masyarakat yang bercorak kosmopolit di kalangan umat Islam. Artinya, umat Islam tidak lagi menempatkan politik dan kekuasaan sebagai satu-satunya orientasi perjuangan.

Sebagian elit Muslim pun mulai berkonsentrasi untuk menempuh perjuangan melalui jalur kultural. Misalnya, dengan mengembangkan institusi pendidikan, ekonomi-bisnis, dan berbagai jenis pelayanan sosial lainnya. Perjuangan melalui jalur kultural ini telah mulai dapat dirasakan hasilnya. Tengoklah berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang siap mencetak generasi masa depan bangsa; lembaga ekonomi-bisnis yang mampu menjadi tumpuan dan memberdayakan potensi sosial-ekonomi umat; serta lembaga sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan yang siap memberikan pelayanan. Pilihan berjuang melalui jalur

kultural telah menghadirkan *blessing in disguise* (rahmat tersembunyi). Ini disebabkan tidak semua potensi umat tersedot untuk kepentingan politik.

Faktor *kedua* dikarenakan tema-tema yang wacanakan elit partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman banyak yang tidak berkaitan dengan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Tema seperti pemberlakuan syariat Islam dan pembentukan negara Islam, dipandang sudah tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi yang dialami masyarakat. Tema ini hanya akan melahir romantisme sejarah tentang kejayaan umat Islam masa silam dan tidak mampu menjawab persoalan yang kini dihadapi umat.

Faktor *ketiga* yang juga penting dipertimbangkan berkaitan dengan performansi elit partai Islam. Rasanya, sudah banyak elit partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman yang tidak menunjukkan karakter sebagai politisi Muslim. Saat ini terasa sulit sekali menemukan politisi Muslim berkarakter seperti Moh. Natsir (Partai Masyumi). Salah satu buktinya, Natsir pernah dengan tegas menolak bergabung dalam kabinet pemerintahan Mr. Ali Sastroamijoyo (PNI) pada masa demokrasi liberal karena merasa ada perbedaan prinsipil dengan kebijakan pemerintah.

Marilah kita bandingkan fenomena tersebut dengan sikap politik yang ditunjukkan elit partai Islam. Mereka yang pada saat kampanye menjanjikan akan memperjuangkan sesuatu yang dipandang ideal menurut ajaran Islam ternyata harus tunduk pada proses tawar-menawar politik.

Hal ini dapat dilihat dari kebingungan elit politik partai Islam dalam menentukan sikap terhadap pemerintah. Terkadang tampak sekali mereka ingin memosisikan diri sebagai oposisi yang kritis. Sementara pada saat bersamaan mereka juga tetap berkeinginan untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Sikap mendua ini jelas menunjukkan memudarnya idealisme dalam berpolitik.

Pertanyaannya; masih adakah peluang bagi partai-partai Islam untuk memperkuat basis konstituennya? Jawabannya tentu berpulang pada aktivis partai, legislator, dan eksekutif dari partai-partai Islam. Mampukah mereka memperbaiki citranya dari politisi yang berorientasi politik-kekuasaan menjadi politisi berkarakter?

Satu lagi yang perlu diperhatikan agar partai Islam menjadi besar adalah tema yang diwacanakan. Berkaitan dengan inilah tema seputar simbol keislaman jelas kurang relevan dan bahkan dapat memunculkan resistensi di kalangan Muslim nominalis. Karena itu, penting dipertimbangkan agar elit partai Islam terlibat mewacanakan persoalan sosial, ekonomi, dan melakukan program riil yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika beberapa strategi ini dilakukan maka peluang partai berplatform Islam dan partai berbasis ormas keislaman untuk mendulang suara dalam pemilu 2014 akan tetap besar.

IMAGINASI MENDIRIKAN NEGARA ISLAM

Kasus pencucian otak yang dialami beberapa mahasiswa oleh aktivis jaringan Negara Islam Indonesia (NII) layak menjadi perhatian. Ini karena korban pencucian otak ternyata telah menyebar di beberapa perguruan tinggi. Bukan hanya pencucian otak, korban juga mengaku telah membayar sejumlah uang. Bahkan untuk membayar uang yang dikatakan sebagai “sedekah” itu korban diperbolehkan untuk berbohong pada orang tua. Kejadian ini menunjukkan bahwa aktivis NII telah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mendirikan negara Islam.

Gagasan mendirikan negara Islam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jelas tidak memiliki tempat. Gagasan tersebut menurut sebagian pemikir Muslim juga dikatakan tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Ali Abd Raziq, seorang pembaru Mesir, menyatakan bahwa syariat Islam secara eksplisit tidak pernah menyebutkan bentuk khusus dari negara yang harus diikuti kaum Muslim. Karena itu dalam kaitan dengan bentuk negara diserahkan pada konstruksi pemikiran manusia.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama juga tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membangun pemerintahan dengan bentuk tertentu. Karena itulah sepeninggal beliau terjadi mekanisme yang sangat beragam dalam menentukan pergantian khalifah. Buktinya, khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dipilih melalui cara yang berbeda. Ini berarti yang ditentukan dalam Islam hanya dasar-

dasar moral yang harus diikuti para pemimpin. Nilai-nilai moral keagamaan itu meliputi keadilan, musyawarah, kebebasan, dan persamaan.

Dengan mengikuti alur berpikir tersebut berarti gagasan mewujudkan negara Islam dapat dikatakan tidak memiliki dasar. Bahkan dalam konteks kekinian cita-cita mendirikan negara Islam sebagai negara ideologis dapat dikatakan tidak kompatibel dengan dunia modern. Realitas juga menunjukkan bahwa cita-cita membangun sistem politik yang bercorak lintas batas atau trans-nasional selalu mengalami kegagalan. Cita-cita ini baru sebatas imajinasi karena tidak pernah berhasil diwujudkan dalam kenyataan. Karena itu Oliver Roy (1994) menyebut cita-cita kelompok Islam politik ini sebagai *Islamic political imagination* (imajinasi politik Islam).

Gagasan mendirikan negara Islam juga dapat dinilai bertentangan dengan prinsip ajaran mengenai kebangsaan atau nasionalisme. Secara historis gagasan kebangsaan di dunia Islam berkembang sejak ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir pada akhir abad XVIII. Sebelum ekspedisi Napoleon, konsep kebangsaan dalam Islam masih sangat kabur. Paham kebangsaan hanya ditentukan melalui ajaran persaudaraan (*ukhuwah*) berdasarkan kesamaan agama. Yang dikenal saat itu adalah konsep “umat” yang berarti persatuan universal berdasarkan ikatan keimanan. Praktiknya, seluruh umat Islam dipersaudarakan berdasarkan kesamaan agama.

Paham kebangsaan yang dibawa Napoleon ini kemudian menginspirasi banyak pemikir Muslim. Salah satunya adalah Al-Thahthawi, seorang pembaru Mesir, yang mengenalkan konsep cinta tanah air pada bangsa Mesir. Gagasan cinta tanah air inilah yang kemudian mendorong suatu bangsa untuk membangun masyarakatnya. Sejak itulah dunia Islam yang sedang berada dalam kekuasaan bangsa asing satu-persatu membebaskan diri. Dengan demikian konsep umat yang didasarkan pada kesamaan agama mulai bergeser pada kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan suatu bangsa.

Harus juga diakui, bahwa sebagian pemikir Muslim belum sepenuhnya menerima gagasan kebangsaan. Mereka masih te-

robsesi mewujudkan kesatuan umat Islam di seluruh penjuru dunia berdasarkan kesamaan agama. Dalam konteks ini gagasan *Pan-Islamisme* al-Afghani dan *Jam'iyah Islamiyah* Rasyid Ridla dapat dijadikan contoh. Dua gagasan ini memiliki keprihatinan yang sama, yakni membangun solidaritas politik berdasarkan kesamaan aqidah. Hal ini dimaksudkan untuk menentang dominasi Barat terhadap dunia Islam. Bahkan Rasyid Ridla secara tegas berkeinginan untuk membangun kembali sistem kekhalifahan seperti periode *al-kulafa' al-rasyidun*. Gagasan bercorak trans-nasional ini tentu bertentangan dengan semangat nasionalisme yang digelorakan sebagian besar pemikir Muslim yang lain.

Wajah Islam Indonesia akhir-akhir ini juga menunjukkan perkembangan paham keagamaan yang bercorak trans-nasional. Identifikasi paham keagamaan ini dapat ditemukan dalam beberapa gerakan keagamaan yang senantiasa memperjuangkan Islam simbolik. Beberapa gerakan ini secara demonstratif juga menonjolkan atribut yang dipahami sebagai bagian dari ajaran Islam seperti berjubah, bercelak, berjenggot, dan bercelana di atas tumit. Budaya Arabisme ini umumnya ditampilkan gerakan salaf di mana pun berada.

Meski gerakan Islam fundamental ini sangat bervariasi, tetapi umumnya memiliki pandangan politik yang sama. Doktrin politik yang dianut adalah bahwa Islam mengajarkan kesatuan agama dan negara (*din wa daulah*). Karenanya kelompok ini berpandangan bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode awal. Yakni, Islam pada masa Nabi dan periode sahabat.

Cita-cita politik tersebut kemudian diwujudkan melalui perjuangan yang berorientasi pada gerakan trans-nasional. Bagi kelompok Islam politik, khilafah Islamiyah merupakan solusi untuk menegakkan cita-cita politik umat Islam. Dengan mencitakan dunia Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah berarti tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan pada kesamaan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gagasan nasionalisme jelas mengakui eksistensi keragaman budaya, etnik, agama, dan bahasa, sebagai entitas yang memiliki

tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sementara imajinasi mendirikan negara Islam yang bercorak kekhalifahan dibangun berdasarkan kesamaan agama dan seringkali mengabaikan batas-batas wilayah negara-bangsa (*nation state*).

Berkaitan dengan maraknya gerakan Islam fundamental maka umat Islam harus menunjukkan jati diri ajaran yang lebih substantif. Cita-cita politik Islam harus dipahami bukan hanya pada bentuk pemerintahan. Yang jauh lebih penting adalah bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan itu harus senantiasa didasarkan pada moral keagamaan.

NASIONALISME VERSUS GERAKAN TRANS-NASIONAL

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari kebangkitan nasional. Peringatan ini merujuk pada pendirian gerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah dokter. Meski pada awalnya lebih menunjukkan sifat-sifat Jawa, namun sejak 1930 Budi Utomo mulai membuka diri bagi orang yang berasal dari luar Jawa. Tanggal pendirian Budi Utomo pun diakui banyak pihak sebagai permulaan kebangkitan nasional atau gerakan kebangsaan.

Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Budi Utomo merupakan permulaan dari siklus 20 tahunan yang sangat menentukan perjalanan Indonesia. Seperti diketahui, pasca berdirinya Budi Utomo terjadi beberapa peristiwa yang sangat melegenda. Sumpah Pemuda pada 1928 merupakan episod kedua yang menunjukkan semangat kaum muda untuk menyatu sebagai suatu bangsa melalui ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

Selanjutnya pada 1945 terlahir angkatan 45 yang sangat berperan dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Pada 1966 ditandai dengan munculnya angkatan 66 yang berperan dalam menyelamatkan bangsa dari pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). Era Orde Baru yang menggantikan Orde Lama juga ditandai gerakan bernada protes sejak 1988. Meski demikian, gerakan ini baru menunjukkan hasil spektakuler pada 21 Mei 1998 tatkala Presiden Suharto

menyatakan mundur. Sejak Orde Baru tumbang pada 1998, kita pun mengenal era reformasi hingga kini.

Sebagai gerakan kebangsaan yang berideologi nasionalis-Jawa, Budi Utomo telah menunjukkan sifat terbuka. Ini dapat diamati melalui penerimaan anggota Budi Utomo terhadap kelompok dari luar. Dalam hal ini patut dikemukakan hubungan baik tokoh-tokoh Budi Utomo dengan KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bahkan Dahlan berkesempatan untuk memberikan pelajaran agama pada anggota Budi Utomo. Tujuan jangka panjangnya adalah agar Dahlan dapat mengajar agama di sekolah-sekolah pemerintah. Apalagi faktanya banyak anggota Budi Utomo yang bekerja di pemerintahan dan sekolah yang didirikan pemerintah.

Saat Budi Utomo menyelenggarakan kongres pada 1917, Dahlan diundang secara khusus untuk memberikan ceramah. Hebatnya lagi, kongres itu ternyata diselenggarakan di rumah Dahlan. Peserta kongres sangat tertarik dengan ceramah Dahlan sehingga beberapa di antara mereka meminta untuk memberikan pengajian sekaligus membuka cabang Muhammadiyah di daerahnya.

Data sejarah ini terasa penting karena dapat memberikan pelajaran bahwa telah terjadi sinergi antara pelopor gerakan nasionalisme dengan tokoh agama. Sinergi ini dimungkinkan karena di antara mereka memiliki kesamaan tujuan, yakni ingin mengantar bangsa menjadi lebih maju, berdaulat, dan terbebas dari segala penindasan.

Pertemuan tokoh-tokoh nasionalis dan agamis juga menunjukkan bahwa cita-cita gerakan kebangsaan itu sejalan dengan ajaran agama. Melalui gerakan kebangsaan, tokoh-tokoh nasionalis berjuang dengan sepenuh hati untuk mencapai kedaulatan bangsa. Sementara agama juga mengajarkan beberapa prinsip yang senada. Misalnya, ajaran tentang kemerdekaan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), dan kesamaan derajat (*al-musawa*).

Nilai-nilai agama ini tampak sangat relevan dengan keinginan tokoh-tokoh pergerakan agar negeri ini merdeka, berdaulat, berkeadilan, dan berkedudukan yang sama dengan bangsa lain.

Melalui kesamaan persepsi inilah tokoh-tokoh pergerakan, baik yang berlatar belakang nasionalis maupun agamis, bersatu untuk mewujudkan suatu organisasi politik yang dalam konteks modern disebut negara bangsa (*nation state*).

Kesadaran mengenai pentingnya mewujudkan suatu bangsa jelas membutuhkan pengorbanan. Apalagi jika kita berkaca pada realitas kemajemukan bangsa Indonesia yang multietnik, agama, dan budaya. Dalam konteks inilah kita perlu merenungkan pernyataan teoretikus Perancis Ernest Renan (1823-1892) ketika mendefinisikan bangsa. Menurut Renan, bangsa adalah suatu perwujudan solidaritas tingkat tinggi yang dibangun oleh kesediaan berkorban pada masa lalu berikut kesiapan untuk menghadapi masa depan. Ini berarti agar kita tetap menjadi suatu bangsa maka dibutuhkan adalah kemampuan merawat solidaritas dan semangat rela berkorban.

Untuk merawat nilai-nilai solidaritas dan pengorbanan yang menjadi ikatan suatu bangsa ternyata tidak mudah. Apalagi saat ini keinginan untuk memperkuat gagasan tentang kebangsaan memperoleh tantangan seiring dengan menguatnya posisi gerakan keagamaan yang bercorak trans-nasional. Identifikasi gerakan keagamaan ini dapat ditemukan dalam beberapa kelompok Islam yang senantiasa memperjuangkan simbol-simbol keislaman.

Meski gerakan keagamaan ini sangat bervariasi, tetapi umumnya mereka memiliki pandangan politik yang sama. Doktrin politik yang dianut adalah bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain, ajaran Islam itu mencakup agama dan negara (*Islam al-din wa al-dawlah*). Doktrin ini menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara universal bersifat kompatibel sehingga harus dilaksanakan di segala waktu dan tempat. Bagi gerakan keagamaan yang bersifat fundamental, pemisahan agama dan negara adalah sesuatu yang tidak terbayangkan.

Kelompok fundamental ini juga berpandangan bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode awal, yakni pada masa nabi dan sahabat. Cita-cita kelompok Islam politik ini kemudian diwujudkan melalui perjuangan yang berorientasi pada gerakan trans-nasional dalam bentuk khilafah.

Bagi kelompok ini, sistem khilafah merupakan solusi untuk menegakkan cita-cita politik umat.

Dengan mencitakan dunia yang dipimpin oleh seorang khalifah berarti tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan kesamaan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan nasionalisme juga mengakui eksistensi keragaman etnik, agama, budaya, dan bahasa, sebagai entitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Sementara gagasan trans-nasional yang dicitakan berbagai gerakan fundamental bersifat lintas batas dan didasarkan kesamaan agama. Pandangan ini jelas bertabrakan dengan gagasan nasionalisme dan hukum internasional yang mengatur batas wilayah suatu bangsa. Karena itu, tugas kita adalah mengajak kelompok-kelompok fundamental untuk terus berdialog. Kita harus yakinkan bahwa kesadaran berbangsa itu sejalan dengan ajaran agama dan keinginan para pendiri negeri ini.

MENYOAL IDEALISME BERPOLITIK

Proses pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 oleh KPU kini sedang berlangsung. Yang menarik, di antara partai yang turut mendaftar ternyata banyak dibidani “pemain lama”. Mereka sebelumnya dikenal aktivis partai tertentu dan kini telah berganti baju dengan partai baru.

Jika kita telisik lebih jauh, fenomena orang berpindah partai ini ternyata menjadi tren, terutama sejak era reformasi. Apalagi era ini telah memberikan ruang kebebasan yang luar biasa seiring dengan kebijakan multipartai. Mereka yang berganti partai pun mengajukan alasan seperti perbedaan idealisme, visi dan misi, serta rasa kecewa karena tidak memiliki kesempatan tampil dalam pemilihan calon anggota legislatif dan kepala daerah.

Apa yang menarik disorot dari fenomena mudahnya seseorang berganti partai pada setiap menjelang pelaksanaan pemilu? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menyatakan bahwa ternyata idealisme dalam berpartai telah mengalami penurunan kadar. Jika dulu orang masuk partai bertujuan untuk memperjuangkan idealisme demi kepentingan rakyat, terutama konstituen yang diwakili.

Sebaliknya, kini orang mendirikan partai lebih banyak dila-tarbelakangi kepentingan pragmatis-jangka pendek sehingga terasa sekali idealisme dalam berpartai itu tergerus secara tajam. Aktivis parpol dijadikan sebagai profesi dan lahan pekerjaan. Jika kepentingan ini tidak tercapai, mereka pun dengan mudah berganti baju dengan mendirikan parpol baru.

Fenomena ini sekaligus menegaskan kebenaran doktrin yang menyatakan bahwa politik adalah *who gets what, when, and how*.

Ditegaskan bahwa politik itu berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Dalam politik juga dikenal hukum yang tak terelakkan bahwa tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Aktivistis parpol juga sering menyatakan bahwa perbedaan pendapat itu biasa.

Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan. Akibatnya, fenomena perpecahan pun sering terjadi dalam dunia politik. Kultur “memecah” dan “berpecah” dalam partai pun seakan menjadi pemandangan umum. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak aktivis partai yang karena perbedaan pendapat atau pendapatan dengan mudah menyatakan keluar dari partai lama dan mendirikan partai baru.

Fenomena memudarnya idealisme dalam berpartai juga dapat diamati melalui pendirian partai baru oleh pemain lama karena partainya tidak lolos *electoral threshold*. Pemilu sepanjang era reformasi memang memberlakukan sistem *electoral threshold* sebagai instrumen untuk mengeliminasi fragmentasi politik yang terus bertambah. Lalu melalui mekanisme *parliamentary threshold* realitas multipartai dapat diminimalkan.

Hanya, mekanisme ini ternyata tidak mampu meminimalisasi hasrat orang untuk mendirikan parpol. Realitas bahkan menunjukkan bahwa syahwat politik aktivis partai menunjukkan tren yang meningkat. Kenyataan bahwa orang begitu mudah berpindah partai atau mendirikan partai baru menunjukkan bahwa mayoritas mereka adalah pekerja politik. Parpol dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan segala sesuatu dengan lebih mudah.

Mereka terpesona dengan godaan kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan, yang dikiranya dapat diraih secara instan. Akibatnya, saat ini sangat susah menemukan aktivis partai yang memiliki idealisme jempolan. Mereka para aktivis partai idealis ini adalah praktisi politik yang berniat dengan sepenuh hati untuk memperjuangkan nilai-nilai yang dianggap fundamental.

Nilai-nilai yang dimaksud adalah budaya politik bermoral, bermartabat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka biasanya tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu kekuasaan dan kepentingan politik jangka pendek. Mereka ini jelas termasuk politisi yang berkarakter dan berpendirian teguh. Tipologi politisi idealis ini

tentu sangat dibutuhkan di tengah buruknya pandangan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik, termasuk parpol. Politisi idealis biasanya selalu menyatukan kata dan perbuatan.

Mereka menjadi aktivis parpol dengan visi, misi, dan nilai-nilai kejuangan yang jelas. Politik bagi mereka adalah jalan panjang untuk memperjuangkan sebuah idealisme. Namun, sangat disayangkan kebanyakan aktivis parpol biasanya hanya mampu berpidato lantang dalam kampanye dan mengumbar janji-janji politik. Jika kekuasaan telah dicapai, janji-janji politik pun tidak akan pernah diperjuangkan dengan penuh kesungguhan.

Karakter ini telah menjadi kecenderungan mayoritas aktivis politik. Tidak peduli parpol Islam maupun parpol sekuler. Mereka telah larut dalam tawar-menawar kekuasaan dan kepentingan politik. Sementara perbaikan nasib rakyat dan komitmen pada nilai-nilai moral politik yang pernah dijanjikan diabaikan begitu saja. Beberapa peristiwa seperti kasus suap, korupsi, dan perempuan/laki-laki, yang melibatkan anggota legislatif dan aktivis parpol, menunjukkan bahwa idealisme dalam berpartai telah benar-benar tergerus.

Rasanya, dunia perpolitikan saat ini sangat merindukan ideolog-ideolog politik semacam Soekarno dan Ali Sastroamijoyo (PNI), Mohammad Roem dan Moh. Natsir (Masyumi), serta KH Idham Chalid dan Sunarjo (NU). Mereka layak dijadikan teladan dalam berpolitik. Bukan saja dalam membangun hubungan baik ketika sedang dilanda perbedaan, melainkan juga idealis dalam perjuangan dan kesederhanaan yang mereka tampilkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada konteks ini rasanya penting dipesankan pada aktivis parpol yang kini sedang mendaftarkan partainya untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Marilah meneladani ideolog politik yang pernah dimiliki negeri ini. Parpol harus dijadikan wadah memperjuangkan idealisme. Dengan begitu, aktivis parpol yang akan *running* dalam pemilu mendatang adalah pribadi-pribadi yang berkarakter sehingga tidak mudah tergiur kepentingan pragmatis jangka pendek.

TATKALA ORANG BEREBUT KEKUASAAN

Pemilu 2014 untuk presiden dan anggota legislatif masih lama. Tetapi persiapan untuk meraih kekuasaan eksekutif dan legislatif telah dimulai. Kandidat presiden dan calon anggota legislatif mulai rajin melakukan survei untuk mengetahui popularitas dan elektabilitasnya.

Tidak hanya itu, mereka pun semakin intensif menyapa calon pemilih dengan cara turun langsung, melalui media massa, dan pemasangan baliho di beberapa tempat strategis. Karena itu jangan heran jika kita sering menyaksikan mereka memasang iklan di televisi, radio, dan gambar diri yang ditempatkan di beberapa sudut kota. Meski sangat mengganggu pemandangan kota dan bahkan menyakiti pepohonan, namun mereka seakan tak mau peduli.

Dalam situasi ini jurus tebar pesona sebagai bagian dari investasi politik untuk pemilu mendatang semakin marak. Bahkan saat ini beberapa calon juga telah membentuk tim sukses mulai tingkat pusat hingga basis massa. Tentu bukan hanya tim sukses yang disiapkan. Semua kebutuhan mulai finansial hingga logistik lainnya telah diperhitungkan dengan matang. Dalam era pemilu langsung ini persoalan “gizi” wajib disediakan calon jika ingin sukses.

Persiapan untuk kemenangan pemilu ternyata bukan hanya dilakukan elit politik tingkat pusat, melainkan juga mereka yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Pertanyaannya, mengapa dalam proses meraih kekuasaan eksekutif dan legislatif mereka harus bersusah payah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita berka-ca pada kisah pengusiran Nabi Adam dan Hawa dari surga. Kedu-anya terusir karena tergoda oleh bujuk rayu setan dengan ma-kan buah dari *syajarah al-khuldi* (pohon keabadian). Menurut bisikan jahat setan, jika Adam-Hawa mau makan buah itu, keduanya akan merasakan kenikmatan surga dalam waktu yang sangat lama dan memperoleh kekuasaan yang tidak pernah binasa. Singkat kisah, keduanya memakan buah khuldi sehingga terusir dari surga (QS. Thaha: 120-121).

Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah pengusiran Adam dan Hawa? Menurut saya, paling tidak ada dua pelajaran pent-ing yang dapat diambil. *Pertama*, ternyata manusia sangat mudah tergoda kekuasaan yang dipersepsi akan dapat membawa pada kenikmatan hidup di dunia. Orang yang memiliki syahwat poli-tik tinggi akan selalu berpikir untuk dapat menikmati kekuasaan di dunia ini dalam waktu yang sangat lama.

Kedua, bahwa keinginan orang untuk mempertahankan kekuasaan itu dikarenakan tidak ingin jika kekuasaan yang telah diraih dengan susah payah harus berpindah tangan pada orang lain. Karena itu kekuasaan yang telah diraih harus dipertahankan selama mungkin. Jika misalnya kekuasaan harus berpindah tan-gan maka diusahakan agar kekuasaan itu jatuh pada istri, anak, menantu, kerabat, dan teman dekatnya. Itulah sebabnya banyak kepala daerah yang tidak boleh maju lagi karena sudah berkuasa dua periode kemudian mencalonkan orang-orang terdekatnya.

Selain bertujuan agar kekuasaan tidak berpindah tangan, strategi mencalonkan orang-orang terdekat dalam pemilu ada-lah untuk menjamin dirinya selamat dari persoalan hukum pas-ca tidak lagi berkuasa. Itu dapat dimaklumi karena ada sekian banyak mantan pejabat publik yang harus berurusan dengan hukum hingga harus rela meringkuk di tahanan setelah purna tugas. Dengan demikian dapat dipahami penyebab orang saling berebut kekuasaan. Bahkan terkadang dalam persaingan mem-perebutkan kekuasaan itu seseorang harus melakukan kampanye hitam (*black campaign*) pada kompetitornya.

Jelas tidak ada larangan bagi seseorang untuk memperebut-kan kekuasaan. Apalagi jika dalam perebutan kekuasaan itu di-

lakukan secara *fair* dengan persaingan yang sehat dan bermartabat. Sebab, berjuang melalui jalur politik dan kekuasaan itu merupakan hak setiap warga negara. Apalagi jika tujuan yang ingin dicapai adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Yang penting, jika kekuasaan telah berhasil diraih maka yang harus dilakukan adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Seorang yang berhasil meraih kekuasaan berarti sedang berada dalam puncak karir politik. Dalam kondisi ini usaha membangun kedekatan rohani pada Tuhan mutlak diperlukan agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu kekuasaan.

Kandidat presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan calon anggota legislatif yang sedang melakukan persiapan untuk *running* dalam pemilu harus berhati-hati dengan bujuk rayu kekuasaan. Pesan ini penting karena, seperti diutarakan Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam semua jabatan publik yang dikompertisikan secara terbuka mayoritas digunakan sebagai ajang mencari pekerjaan.

Pernyataan tersebut memang dikemukakan untuk merespon keterlibatan beberapa pejabat publik yang bersifat *ad hoc* dalam kasus korupsi dan suap. Tetapi substansi pernyataan ini layak dijadikan peringatan bagi mereka yang sedang berjuang untuk meraih kekuasaan. Sebab fakta menunjukkan telah banyak pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang terlibat kasus korupsi, suap, dan perempuan, hingga harus berurusan dengan aparat.

Penting dipesankan pada mereka yang sedang antri di bawah pohon khuldi, agar dalam berkompetisi meraih kekuasaan mampu memberikan teladan pada rakyat. Sebab kekuasaan yang diraih dengan cara terhormat pasti akan melahirkan pemimpin dan pejabat publik yang dicintai rakyat. Jika ini yang dilakukan maka mereka berarti turut menyemai nilai-nilai demokrasi di negeri tercinta.

MEMAHAMI BUDAYA KONTRAK POLITIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) jatuh pada 8 Juli 2009. Jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pun sudah ditentukan pada 10-16 Mei 2009. Ibarat berpacu dengan waktu, elit partai pun kian agresif melakukan berbagai pertemuan untuk membangun kesepahaman politik. Karena itu tidak mengherankan jika perkembangan politik berlangsung begitu cepat. Partai Golkar yang sebelumnya mengalami hubungan putus-sambung dengan Partai Demokrat akhirnya benar-benar menyatakan berpisah.

Melalui mekanisme rakernas Partai Golkar akhirnya memberikan mandat penuh pada Jusuf Kalla (JK) untuk membangun silaturahmi politik dengan pimpinan partai lain. Bahkan lebih dari itu, JK telah mendeklarasikan diri sebagai capres dengan menggandeng Wiranto sebagai cawapres. Deklarasi JK sebagai capres tentu akan menambah bursa persaingan dalam pilpres nanti. Sebelumnya, SBY dan Megawati telah memastikan diri akan ambil bagian untuk *running* dalam pilpres. Bahkan sangat mungkin akan muncul capres alternatif yang sangat lantang mengusung tema perubahan, seperti digelindingkan Rizal Ramli dan Prabowo Subianto.

Perkembangan politik yang kian dinamis tersebut menyebabkan elit partai seperti beradu lari melakukan safari politik dengan elit partai lain untuk menjajagi kemungkinan membangun koalisi. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan para pimpinan partai pun tidak segan melakukan kesepahaman politik dan kemudian mempublikasikan ke media massa. Usaha elit partai untuk mem-

bangun kesepahaman politik inilah yang kini populer disebut kontrak politik.

Sebagai tren baru dalam budaya politik di Indonesia kontrak politik sesungguhnya telah menjadi fenomena sejak pemilu 2004. Kontrak politik menjadi semakin intensif dilakukan seiring dengan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung mulai presiden, gubernur, bupati, dan walikota. Bahkan saat berkampanye pada pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, para calon anggota legislatif (caleg) banyak yang melakukan kontrak politik dengan calon pemilihnya. Misanya, ada caleg yang berani meneken kontrak politik untuk memberikan seluruh gaji yang akan diperoleh pada rakyat jika terpilih menjadi legislator.

Secara umum kontrak politik dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang melibatkan antarelit partai, antara caleg dengan calon pemilih, antara elit partai dengan calon pejabat pemerintahan yang akan didukung, atau rakyat dengan pemimpinnya. Yang harus dicermati, dalam kasus kontrak politik yang dilakukan elit partai dengan calon pejabat pemerintah, posisi rakyat seringkali hanya sebagai pemandu sorak (*cheer leaders*) dan alat mobilisasi. Dalam posisi ini rakyat tetap akan mengalami marginalisasi baik secara sosial maupun ekonomi. Bahkan secara politik rakyat dapat mengalami tuna kuasa (*powerlessness*).

Di era reformasi ini semua orang berpeluang menjadi pelaku kontrak politik. Termasuk dalam hal ini adalah elit agama (kyai) yang pada masa sebelumnya hanya berjuang di ranah kultural. Apalagi saat ini banyak elit agama yang telah menjadi pejabat publik. Kondisi ini tentu sangat memungkinkan mereka menjadi pemain dalam budaya kontrak politik. Sebagian elit agama bahkan telah sedemikian jauh bermain dalam ranah politik praktis. Realitas ini kemudian menyebabkan munculnya suara sumbang pada hampir setiap ada kontrak politik. Dalam hal ini kontrak politik sering dianggap permainan di tingkat elit.

Dalam tradisi Islam, kontrak politik kurang lebih dapat disamakan dengan konsep bai'at (*al-bay'ah*). Konsep ini dapat dipahami bahwa asal sebuah negara disebabkan adanya keinginan bersama kelompok masyarakat untuk mendirikan negara dalam rangka membangun tatanan masyarakat yang tunduk dan patuh

pada pimpinan. Dalam perspektif ini, negara dapat berdiri dikarenakan adanya kontrak sosial (*al-'aqd al-ijtima'iy*) yang terjadi antara pemimpin dan rakyat dalam bentuk bai'at.

Ibn Khaldun, sosiolog Muslim kenamaan, menyatakan bahwa bai'at adalah perjanjian atas dasar ikatan kesetiaan rakyat dengan pemimpinnya. Hampir sama dengan tradisi Islam, di Barat juga dikenal konsep kontrak sosial (*social contract*) seperti dikemukakan J. J. Rousseau (1712-1778). Teori kontrak sosial Rousseau menekankan pentingnya perjanjian antarunsur masyarakat sehingga terwujud kebaikan bersama (*public good*).

Perbincangan mengenai kontrak politik berikut implikasi sosial, ekonomi, dan politik yang menyertai sesungguhnya dapat dijelaskan dengan meminjam kerangka pikir Peter Blau mengenai teori pertukaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa pertukaran dan kekuasaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan bahwa transaksi dan kekuasaan adalah akibat dari pertukaran yang membentuk tekanan sosial sehingga harus dipelajari dari dimensi pertukaran itu sendiri.

Ketika seseorang menggunakan kekuasaan terhadap yang lain, berarti ia telah menekan dan menarik ongkos dari orang yang dibebani kekuasaan tersebut. Proses pertukaran dimungkinkan karena ada pihak yang membutuhkan pertolongan dan pihak yang memberikan pertolongan. Di sinilah aspek kepentingan akan tampak menonjol. Maka tidak mengherankan jika dalam budaya kontrak politik pembicaraan mengenai "siapa mendapatkan apa" biasanya menjadi perhatian utama.

Dengan penjelasan tersebut berarti upaya elit partai untuk membangun budaya kontrak politik harus dipahami dalam konteks teori pertukaran. Tetapi, kita tentu tidak boleh berburuk sangka terlebih dulu. Karena jika benar dalam kontrak politik terdapat kalkulasi sosial, ekonomi, dan politik, maka hal itu harus dipahami dalam konteks yang lebih proporsional. Misalnya, pada setiap kontrak politik meniscayakan adanya ongkos politik. Hanya saja akan lebih elegan jika tujuan kontrak politik adalah untuk memberikan jaminan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*), kepastian hukum (*law enforcement*), dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Nah, persoalannya kini berpulang pada komitmen elit partai yang sedang dan akan melakukan kontrak politik. Adakah dalam kontrak politik ini dilandasi kepentingan pragmatis jangka pendek. Atau sebaliknya, motivasi melakukan kontrak politik adalah kepentingan jangka panjang dalam rangka membangun bangsa dan negara menjadi lebih kuat, sejahtera, dan bermartabat. Publik tentu berharap agar komitmen jangka panjang ini yang dijadikan dasar melakukan kontrak politik.

Terakhir, kontrak politik juga harus dilakukan secara transparan, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam hal ini elit partai tentu berkewajiban mendewasakan dan bahkan memberikan pencerahan pada publik agar tidak selamanya tereksplorasi oleh kepentingan elit yang melakukan kontrak politik.

MENDAMBAKAN LEGISLATIF WELL EDUCATED

Kontroversi pembangunan tol tengah kota terus menggelinding. Berbagai komponen masyarakat yang mengatasnamakan Warga Surabaya Menggugat secara resmi telah menyuarakan aspirasinya ke DPRD Surabaya. Intinya mereka menentang pembangunan tol tengah kota. Penolakan terhadap mega proyek tersebut semakin menguat seiring dengan sikap warga yang bakal terkena dampak akibat pembangunan tol tengah kota. Mereka bersepakat menolak untuk menjual lahan yang akan dilewati proyek tersebut.

Tanggapan di internal anggota DPRD Surabaya juga terbelah. Sebagian besar mereka setuju dan sebagian yang lain masih menunjukkan sikap mengambang. Tetapi kalangan akademisi dan profesional tetap pada pendiriannya, bahwa tol tengah kota akan berdampak buruk terhadap pembangunan Surabaya.

Akademisi dan ahli tata ruang kota, Profesor Johan Silas, termasuk yang paling aktif menyuarakan penolakan terhadap pembangunan tol tengah kota. Menurutnyanya, jalan lingkar barat dan timur dianggap lebih efektif untuk mengurai kemacetan di jantung kota. Pakar transportasi dari ITS, Haryo Sulistyarno, juga telah memberikan pendapat senada. Jika para akademisi yang sangat berkompeten telah menyuarakan pendapat, pertanyaannya; apa lagi yang hendak diperjuangkan anggota DPRD Surabaya?

Jika DPRD Surabaya tetap berkeras hati memaksa pemerintah kota untuk membangun tol tengah kota maka patut diduga ada motif tertentu di balik sikap tersebut. Bahkan DPRD dapat dikatakan telah melampaui tugas dan wewenangnya karena persoalan pembangunan

berada dalam ranah eksekutif. Karena itulah maka kita patut mengajak anggota DPRD untuk berpikir yang terbaik bagi warga Surabaya, bukan untuk kepentingan siapa pun, termasuk investor.

Bukankah pada saat ikut pemilu calon anggota legislatif telah berikrar untuk membela kepentingan warga? Karena itu, semua program yang diputuskan pemerintah kota dan legislatif harus benar-benar bermanfaat untuk warga. Peringatan kelompok akademisi dan profesional rasanya cukup untuk dijadikan dasar dalam mengambil sikap mengenai kontroversi pembangunan tol tengah kota.

Di samping mendapat penolakan dari akademisi dan profesional, rencana pembangunan jalan tol tengah kota dapat dianggap mengganggu salah satu *branding* Surabaya sebagai kota yang hijau dan bersih (*green and clean*). Ruangan terbuka dan hijau sebagai sarana berkumpul warga untuk melepas kepenatan dan menikmati udara segar terancam hilang. Instansi lain, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), juga telah mengingatkan potensi kerusakan pipa yang telah ditanam di sepanjang jalan yang akan dilewati proyek tol tengah kota.

Ini belum termasuk ongkos sosial ekonomi yang harus ditanggung warga dan pemerintah. Kalau semua peringatan ini belum juga mengubah pola pikir sebagian anggota DPRD Surabaya rasanya kita telah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan. Tetapi, kita yakin bahwa dinamika politik akan berkembang dengan cepat. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah kota dan legislatif.

Warga kota yang telah memercayakan sebagian urusan publik pada legislatif layak berharap agar para legislator lebih bersikap *well educated*. Apalagi realita menunjukkan bahwa *resources* anggota dewan juga terkadang sangat terbatas. Karena itu, untuk menyelesaikan persoalan kota yang begitu kompleks perlu ada kesadaran dengan cara banyak mendengar, termasuk masukan dari kalangan akademisi, profesional, dan warga. Harapan ini tidak hanya penting disuarakan pada legislatif, melainkan juga eksekutif.

Penelitian Profesor Eko Prasjo dari Universitas Indonesia tentang *Otonomi Daerah dan Perwujudan Good Governance* (2007) menunjukkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat seringkali tidak menguasai persoalan dengan baik. Bahkan dalam banyak hal DPRD sering terjebak dengan pendekatan teknokratis pemerintah daerah (eksekutif). Juga dikatakan

bahwa alokasi anggaran dalam penentuan program yang disepakati legislatif dan eksekutif terkadang belum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mayoritas masyarakat. Maka, tidak heran jika sering terjadi kesenjangan dalam merumuskan dan melaksanakan program kegiatan, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.

Berkaitan dengan keberadaan sebagian anggota DPRD Surabaya yang tidak mau menunjukkan empatinya terhadap pemikiran yang disuarakan akademisi dan profesional, maka yang dapat dilakukan adalah memberikan hukuman dengan tidak memilih kembali pada pemilu mendatang. Hukuman ini memang tidak memuaskan karena berarti ada masa tunggu yang cukup lama. Tetapi inilah resiko dari pilihan politik warga kota yang pada pemilu lalu memberikan suaranya pada calon anggota legislatif yang kini telah berhasil menjadi legislator.

Harus diingat, bahwa dalam politik berlaku hukum yang bersifat *irreversible*. Artinya, jika pilihan politik telah dijatuhkan maka konsekuensinya dukungan itu tidak dapat ditarik begitu saja sebelum saatnya tiba. Mekanisme politik melalui pemilu mengharuskan kita untuk mengevaluasi pilihan setiap lima tahun sekali. Pada saat itulah kita berkesempatan memilih orang-orang terbaik untuk menjadi wakil rakyat. Mekanisme ini juga berlaku bagi pejabat publik dari eksekutif yang dipilih melalui pemilu.

Rendahnya kompetensi anggota legislatif juga dikarenakan kesalahan elit partai politik dalam melakukan rekrutmen anggota, terutama pada saat pencalonan anggota legislatif. Rekrutmen calon anggota legislatif seringkali lebih mengedepankan popularitas dan kemampuan finansial dibanding kompetensi yang dimiliki. Akibatnya, mereka yang berhasil lolos sebagai legislator adalah orang-orang yang populer dan beruang.

Kita memang tidak dapat menyalahkan begitu saja anggota dewan yang terpilih. Sebab, orang yang memiliki kompetensi di bidang yang sangat dibutuhkan lembaga legislatif seringkali ragu-ragu jika harus terjun di dunia politik. Pada konteks inilah rasanya kita menyadari betapa penting berjuang melalui ranah politik praktis. Ini berarti harus ada kesediaan dari sebagian akademisi dan profesional untuk berkiprah dalam politik. Dengan cara ini maka semua produk kebijakan yang lahir dari lembaga-lembaga publik seperti eksekutif dan legislatif diharapkan akan berorientasi pada kepentingan rakyat.

PENCALONAN FIGUR NON KADER DALAM PILKADA

Ada fenomena yang menarik diamati dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan diselenggarakan di 18 kabupaten/kota Jatim sepanjang 2010. Fenomena yang dimaksud adalah munculnya banyak calon non kader yang diusung partai politik atau gabungan partai politik (parpol). Salah satunya, pasangan calon walikota (cawali) dan calon wakil walikota (cawawali) yang akan *running* dalam pilkada Surabaya. Sejauh ini setidaknya terdapat lima pasangan cawali dan cawawali, yakni: Tri Rismaharini-Bambang DH (PDIP), Arif Afandi-Adies Kadir (Demokrat dan Golkar), Bagio Fandi Sutadi-Mazlan Mansyur (PKB dan Gerindra), Fandi Utomo-Yulius Bustomi (PKS, PDS, PKNU, dan PPP), dan Fitra Djaja-Naen Soeryono (independen).

Jika ditelisik lebih jauh maka dapat dikatakan bahwa tidak semua pasangan calon yang diberangkatkan parpol atau gabungan parpol tersebut merupakan kader partai pengusung. Misalnya, Tri Rismaharini yang diusung PDIP. Selama ini Tri Rismaharini lebih dikenal sebagai profesional dan birokrat yang memiliki karir cemerlang. Sebelum mencalonkan diri, Tri Rismaharini adalah pejabat karir yang sangat sukses menahkodai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Balitbang, dan Bappeko Surabaya. Demikian halnya dengan Bagio Fandi Sutadi (Pak Tadi) jelas bukan kader PKB dan Gerindra. Pak Tadi adalah pejabat yang memulai karir dari bawah dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Walikota Surabaya.

Ada juga nama Fandi Utomo yang menjadi aktivis partai Demokrat tetapi diusung gabungan parpol lain. Selain sebagai

aktivis partai, mantan tim pemenang Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya ini juga dikenal pengusaha sukses. Bahkan keberhasilan Fandi Utomo menyandingkan PKS, PKNU, dan PPP dengan PDS dapat dianggap sebagai capaian yang luar biasa. Hal ini karena gabungan parpol pengusung pasangan Fandi Utomo-Yulius Bustomi sangat pluralis. Ada perbedaan ideologis yang sangat menonjol di antara gabungan parpol pengusung.

Catatan khusus layak diberikan pada PKS yang mau bergabung dengan PDS untuk mengusung pasangan calon non kader. Bukan hanya publik yang dibuat terhenyak. Kader dan simpatisan PKS pun tidak pernah memperkirakan sebelumnya. Tidak mengherankan jika pilihan politik PKS ini dianggap aneh. Akibatnya, PKS harus menerima kenyataan dicemooh konstituen dan simpatisannya. Apalagi terdengar suara miring yang menyatakan bahwa pilihan tersebut sesungguhnya tidak gratisan. Jika kabar ini benar adanya maka tentu saja tabiat politik aktivis PKS ini sangat tidak sesuai dengan citra yang selama ini ditampilkan di depan publik.

Sebelumnya PKS telah mensosialisasi Yulyani, kader terbaik dan mantan anggota DPRD Surabaya periode 2004-2009, untuk diusung sebagai cawali atau cawawali. Tim pemenang Yulyani pun telah dibentuk dan bekerja. Tetapi, tiba-tiba elit PKS mengalihkan dukungan pada Fandi Utomo-Yulius Bustomi. Kader dan simpatisan PKS yang terkenal militan pun dibuat terkejut. Bahkan hingga kini belum ada penjelasan yang memuaskan mengenai pilihan politik PKS.

Padahal dalam pemilu 2009, PKS merupakan partai pemenang ketiga bersama PKB dan Golkar, yang sama-sama memperoleh lima kursi di DPRD Surabaya. Artinya, PKS sesungguhnya memiliki modal sosial yang cukup untuk mengusung calon sendiri. Tetapi, dinamika politik terkadang memang berkembang begitu cepat. Publik pun harus mulai terbiasa dengan kejutan-kejutan yang kerap terjadi dalam politik.

Fenomena pencalonan figur non kader dalam pilkada rasanya patut mendapat penjelasan. Menurut saya, ada beberapa alasan yang kiranya dapat menjelaskan ketertarikan parpol atau gabungan parpol mengusung calon non kader. *Pertama*, dalam era pilkada langsung oleh rakyat memang dibutuhkan figur yang

populer. Karena itu, sebelum partai membuat keputusan senantiasa didahului dengan mengadakan survei mengenai popularitas dan elektabilitas calon.

Figur yang disurvei biasanya merupakan tokoh yang populer atau mereka yang mendaftar melalui parpol tersebut. Berdasar hasil survei inilah calon akan diputuskan. Karena parpol biasanya membuka pendaftaran secara terbuka, maka banyak calon non kader yang mendaftar. Dengan demikian sangat dimungkinkan hasil survei dimenangkan calon non kader yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Dengan mengandalkan figur yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, tidak peduli kader atau non kader, maka peluang memenangkan pilkada akan terbuka.

Kedua, jujur harus diakui bahwa parpol seringkali tidak mempersiapkan secara serius kader terbaiknya untuk maju dalam pilkada. Bisa juga dikatakan bahwa parpol sesungguhnya mengalami kekurangan kader yang berkualitas, populer, dan memiliki elektabilitas tinggi. Kondisi ini jelas harus menjadi otokritik bagi parpol dalam menyelenggarakan kaderisasi. Di samping itu, minimnya kader berkualitas juga diakibatkan oleh buruknya sistem perekrutan keanggotaan dalam parpol. Faktor ini penting menjadi perhatian karena seringkali kader partai yang memiliki loyalitas tinggi, kredibel, dan dukungan basis massa riil harus kalah bersaing dengan calon baru yang memiliki kekuatan modal finansial.

Fenomena ini dapat diamati dalam setiap pemilihan ketua partai, rekrutmen calon anggota legislatif, dan pencalonan kepala daerah. Dalam proses pemilihan beberapa even politik tersebut seringkali terjadi marginalisasi kader yang telah berkeringat, menunjukkan loyalitas, dan bahkan berdarar-darah dalam memperjuangkan parpol. Para kader itu dipaksa harus mengalah pada pendatang baru yang belum banyak berjuang tetapi memiliki modal dan kedekatan dengan elit parpol. Budaya ini jelas sekali terjadi pada saat penentuan calon yang akan berlaga dalam pilkada.

Ketiga, pilihan parpol terhadap figur non kader sering kali didasarkan pada kalkulasi untung-rugi. Tegasnya, ada hitung-hitungan ekonomi yang melatarbelakangi pilihan parpol ketika mengusung calon dalam pilkada. Maka, tawar-menawar harga antara calon dan parpol pengusung dan pendukung menjadi

fenomena yang lumrah terjadi. Para calon jelas membutuhkan parpol sebagai kendaraan politik untuk dapat ikut berkompetisi dalam pilkada. Parpol pengusung pun tidak akan memberikan kendaraan secara gratisan.

Dengan dalih untuk membesarkan partai, biaya sosialisasi, biaya logistik, dan kepentingan tim pemenangan, maka parpol biasanya mengajukan penawaran harga. Jadilah para calon itu ibarat sapi perahan parpol. Akibat budaya politik yang *high cost* ini para calon pun harus menyiapkan modal yang besar untuk maju dalam pilkada. Barangkali karena merasa telah mengeluarkan modal, maka yang ada dalam benak pikiran calon adalah mengembalikan modal secepat mungkin ketika memenangkan pilkada. Dari sinilah praktik penyelewengan jabatan itu dimulai. Maka, tidak mengherankan jika upaya pemberantasan budaya korupsi seringkali harus menghadapi jalan berliku nan terjal.

Dari beberapa alasan tersebut tampaknya penjelasan yang begitu dominan dipahami oleh publik adalah argumentasi yang ketiga. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian publik pun mengenal istilah mahar politik, ongkos politik, *money politic*, dan bahkan sedekah politik. Intinya, bahwa fenomena pencalonan figur non kader itu banyak berkaitan dengan masalah finansial. Apalagi tabiat di kalangan politisi selalu menekankan politik kepentingan. Juga ada guyonan di kalangan politisi, bahwa perbedaan pendapat itu hal biasa. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan.

Budaya tersebut jelas selaras dengan doktrin politik yang menyatakan: “who gets what, when, and how”. Pernyataan ini menjelaskan bahwa politik itu berkaitan dengan persoalan mengenai “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya.” Dalam politik juga dikenal pernyataan bahwa tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Artinya, jika kepentingan sudah ketemu, maka segala persoalan dapat dibicarakan.

PERLU REKONSILIASI PASCA PILWALI

Hasil pemilihan walikota (pilwali) Surabaya mengantarkan pasangan Tri Rismaharini-Bambang Dwi Hartono sebagai pemenang. Pasangan dengan panggilan akrab Ridho ini mengungguli Arif Afandi-Adies Kadir (Cacak), Fandi Utomo-Yulius Bustami (FuYu), Bagio Sutadi-Mazlan Mansyur (Dimaz), dan Fitrajaja Purnama-Naen Suryono (Fitra-Naen). Seperti diperkirakan banyak pengamat bahwa persaingan yang sesungguhnya dalam pilwali Surabaya terjadi antara pasangan Ridho dan Cacak. Bahkan menjelang pilwali, banyak pengamat mengestimasikan akan terjadi dua putaran yang mempertemukan dua pasangan tersebut.

Tetapi, realitas politik menunjukkan bahwa pasangan Ridho unggul. Hasil rekapitulasi suara di level Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menunjukkan kemenangan Ridho dengan perolehan suara 358.187 (38,52 persen). Sementara Cacak memperoleh suara 327.516 (35,23 persen). Ini berarti terjadi selisih suara 30.671 untuk kemenangan Ridho. Rekapitulasi suara di level PPK oleh KPU ini hampir sama dengan hasil *quick count* yang dirilis oleh beberapa lembaga survei sehari setelah pilwali.

Tahap selanjutnya yang dilakukan KPU Surabaya adalah menetapkan hasil pilwali, melaporkan pada gubernur, dan menunggu proses pelantikan. Jika semua proses ini lancar maka Surabaya dalam lima tahun mendatang dipastikan akan dipimpin Tri Rismaharini (Bu Risma). Ini berarti Bu Risma telah berhasil mencetak sejarah sebagai walikota perempuan pertama yang memimpin Surabaya. Hebatnya lagi, sejarah itu diukir hampir bersamaan dengan hari ulang tahun Surabaya yang ke-717.

Pasangan Cacak memang masih berpeluang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi, melihat realitas politik dan selisih suara yang begitu besar, rasanya usaha Tim Sukses Cacak untuk membawa sengketa pilwali ke MK akan sia-sia. Berdasarkan realitas politik itu, beberapa mantan calon walikota seperti Bagio Sutadi dan Fitrajaja Purnama telah mengambil langkah positif dengan bersikap legowo mengakui kemenangan Bu Risma. Sikap dua mantan calon walikota ini tentu layak diapresiasi. Sebab, meski sempat bersitegang karena sama-sama menjadi kompetitor, namun realitas politik menunjukkan bahwa mereka berdua kurang didukung oleh rakyat. Karena itu, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mengakui kemenangan calon lain.

Bersikap Legowo

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU Surabaya jelas menjadi ujian yang sangat berat bagi pasangan Cacak. Sebab, dalam survei yang dilakukan beberapa lembaga menjelang pilwali menunjukkan bahwa pasangan Cacak masih sangat dominan. Tetapi, dunia politik memang selalu menghadirkan kejutan. Apalagi perilaku politik pemilih dalam era pemilihan langsung ini juga sangat sulit diprediksi.

Besarnya angka golongan putih (golput) juga diindikasikan turut mempengaruhi perolehan suara pasangan Cacak. Kekalahan pasangan Cacak dalam pilwali juga menjadi pelajaran berharga karena calon yang didukung partai-partai besar ternyata harus tumbang. Hal ini karena konteks pilwali sangat berbeda dengan pemilihan anggota legislatif.

Publik Surabaya kini menunggu sikap resmi dari Arif Afandi dan Fandi Utomo untuk dengan elegan menerima kekalahan dan mengakui kemenangan Bu Risma. Jika ini dilakukan oleh keduanya maka pasti akan menjadi pelajaran demokrasi yang sangat berharga. Sebab, harus diakui bahwa warga Surabaya sudah sangat lelah mengikuti berbagai hajatan demokrasi mulai pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, hingga pilwali.

Seluruh sumber daya, pikiran, dan anggaran, telah banyak terkuras untuk penyelenggaraan hajatan demokrasi. Karena itu, setiap pasangan calon harus diingatkan pada janji setia untuk siap

menang dan siap kalah sebagaimana yang diikrarkan menjelang pelaksanaan pilwali. Setiap pasangan calon harus legowo dengan apa pun pilihan rakyat. Inilah substansi dari sistem demokrasi yang menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat.

Persoalannya, kesiapan untuk menang dan kalah dalam setiap pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak hanya berkaitan dengan pasangan calon yang berlaga. Lebih dari itu, sikap siap menang dan siap kalah juga harusnya ditunjukkan partai pengusung, partai pendukung, dan tim sukses. Justru kesiapan berbagai kelompok inilah yang seringkali menyebabkan ikrar damai sulit direalisasikan. Karena itu tidak mengherankan jika dalam pilkada sering terjadi perang klaim kemenangan oleh setiap tim sukses. Fenomena ini memang dapat dipahami. Sebab, setiap tim sukses pasti menginginkan pasangan yang didukung keluar sebagai pemenang.

Jika sikap siap menang dan siap kalah tidak secara konsisten dijalankan maka konflik politik akan terus memanas. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menyebabkan dendam politik pasangan yang menang terhadap pasangan yang kalah. Masyarakat tentu tidak mengharapkan hal ini terjadi. Karena itulah pasangan yang kalah secepatnya harus mengucapkan selamat pada pasangan yang menang.

Perlu Rekonsiliasi

Meski hanya diusung PDIP, tetapi sejatinya kemenangan Bu Risma dalam pilwali harus dilihat sebagai kemenangan warga Surabaya. Seluruh warga Surabaya telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Kekhawatiran sebagian orang yang menduga bahwa kerusuhan sosial di Mojokerto dapat menjalar ke Surabaya akibat sentimen ideologi dan kepentingan politik ternyata tidak terjadi.

Kita layak bersyukur karena warga Surabaya mampu melakukan pesta demokrasi dengan cara yang sangat beradab. Masyarakat juga layak memberikan apresiasi terhadap semua calon walikota (cawali) dan calon wakil walikota (cawawali) yang turut berkompetisi dalam pilwali. Semua cawali dan cawawali jelas telah memberikan kontribusi bagi pendidikan demokrasi, khususnya bagi warga Surabaya.

Yang perlu dilakukan oleh pasangan pemenang pilwali Surabaya adalah merangkul seluruh komponen masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah pasangan calon yang pernah menjadi kompetitornya. Pasangan Ridho harus diingatkan bahwa masyarakat Surabaya sangat plural.

Bahkan dalam konteks pluralitas ini Surabaya layak dikatakan “Indonesia Mini”. Pluralitas etnik, agama, dan budaya, terjadi di Surabaya. Sepanjang dilihat secara positif maka pluralitas pasti akan menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun Kota Surabaya. Sentimen ideologi, konflik politik, dan kampanye hitam (*black campaign*) yang terjadi selama proses pilwali tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan dendam politik.

Pada konteks inilah pasangan Ridho harus didorong melakukan rekonsiliasi dengan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat. Hanya dengan cara ini, pasangan Ridho akan dapat merealisasikan program yang dijanjikan selama masa kampanye. Posisi kelompok-kelompok di masyarakat akan menjadi saksi sekaligus kekuatan *check and balances* pemerintahan yang akan dipimpin pasangan Ridho. Akhirnya, diucapkan selamat pada warga Kota Surabaya karena telah menuntaskan proses pilwali yang melelahkan ini secara demokratis dan berkeadaban.

Bu Risma yang akan menjadi nahkoda Surabaya lima tahun mendatang selama ini memang telah dikenal dengan *brand* sebagai kreator tata kota Surabaya sehingga menjadi nan hijau dan segar. Publik tentu akan menjadi saksi gebrakan Bu Risma selanjutnya. Masih banyak persoalan Kota Surabaya yang membutuhkan perhatian. Itu berarti Bu Risma harus bekerja keras untuk berbuat yang terbaik sehingga mampu mencetak sejarah sebagaimana tema kampanye yang digelorkan pada saat pilwali.

MENENTUKAN BRANDING KOTA SURABAYA

Pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) dan Bambang DH (Bambang) telah resmi dilantik Gubernur Jawa Timur. Yang membanggakan, Risma berhasil mencatatkan diri sebagai walikota perempuan pertama dalam sejarah Kota Surabaya. Ini berarti tema mencetak sejarah yang senantiasa digelorakan Risma-Bambang pada saat kampanye pemilihan wali kota (pilwali) sebagian telah menjadi kenyataan. Warga Kota Surabaya kini bersiap menjadi saksi lahirnya kebijakan-kebijakan yang men-sejarah dalam era kepemimpinan Risma. Tentu saja, sejarah yang harus dicatat adalah prestasi yang membanggakan warga kota.

Pada konteks inilah Risma-Bambang perlu banyak belajar pada walikota terdahulu, terutama mereka yang telah berhasil menjadikan era kepemimpinannya dicatat sejarah dengan tinta emas. Jika diteliti, maka ada di antara walikota terdahulu yang telah berhasil menentukan *branding* (labelisasi) Kota Surabaya sehingga begitu dikenang publik. Nama pertama yang layak disebut adalah R. Soekotjo yang memimpin Surabaya era 1967-1974. Soekotjo dikenal sebagai peletak dasar modernisasi Kota Surabaya. Sejumlah gagasan besar telah berhasil diwujudkan pada era kepemimpinannya.

Pasar Turi yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud pada 1971 merupakan proyek prestisius Soekotjo. Dalam perkembangannya kita menyaksikan Pasar Turi pun telah menjadi pusat grosir terbesar di Surabaya, bahkan Jawa Timur. Karena itu tidak berlebihan jika Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, ketika

melantik Risma-Bambang berpesan untuk melanjutkan pembangunan Pasar Turi. Pembangunan Pasar Turi harus menjadi atensi Risma-Bambang karena dapat dijadikan ikon Kota Surabaya.

Soekotjo juga dikenang warga kota karena telah menetapkan Hari Jadi Kota Surabaya pada 31 Mei 1929. Hingga kini tanggal 31 Mei selalu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Surabaya. Dalam buku Agus Wahyudi berjudul *Sketsa Tokoh Surabaya* (2006) telah dikemukakan sejumlah karya besar Soekotjo seperti, pembangunan Pasar Atom, Terminal Joyoboyo, *Surabaya Industrial Estate Rungkut* (PT SIER), dan Perumahan YKP (Yayasan Kas Pembangunan). Yang luar biasa, Soekotjo juga telah membuat *Masterplan* Surabaya 2000. Ini berarti Suko-tjo merupakan tipikal pemimpin visioner dengan gagasan besar karena telah memikirkan Surabaya 25 tahun ke depan.

Walikota terdahulu yang juga perlu dijadikan inspirasi adalah Poernomo Kasidi, yang akrab dipanggil Pak Poer. Kiprah Pak Poer sebagai Walikota Surabaya periode 1984-1994 layak dijadikan teladan. Ia dikenal sebagai manager Kota Surabaya yang handal karena berhasil menangani masalah banjir. Pak Poer menyadari bahwa banjir tidak mungkin dapat dihilangkan. Karena itu yang dilakukannya adalah meminimalkan waktu genangan air tatkala terjadi banjir.

Beberapa cara pun ditempuh seperti menjaga kebersihan, perbaikan saluran, dan penyudetan saluran agar terhubung satu dengan yang lain. Pak Poer pun dikenal dengan *branding* “walikota got,” karena begitu perhatian terhadap saluran air dan gorong-gorong yang ada di seluruh penujur kota. Prestasi lain yang ditorehkan Pak Poer adalah membentuk Pasukan Kuning untuk menjadikan Surabaya bersih dan bebas banjir.

Perlu Branding Kota

Sebagai pemimpin baru kota metropolis, Risma-Bambang tentu sudah ditunggu dengan pekerjaan yang sangat berat. Sejumlah persoalan di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama, telah menunggu sentuhan tangan keduanya. Warga Surabaya tentu berharap banyak pada keduanya. Apalagi Risma telah menunjukkan kinerja yang cemerlang ketika menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta Kepala Badan Perencanaan Kota

Surabaya. Bambang DH juga menunjukkan *track record* yang baik ketika menjadi Walikota Surabaya.

Salah satu yang perlu segera dirumuskan oleh Risma-Bambang dalam menjalankan tugas adalah menentukan label atau merek Kota Surabaya. Dengan meminjam istilah Hermawan Kartajaya, Risma-Bambang harus menentukan *branding* Surabaya untuk diterjemahkan dalam berbagai kebijakan pembangunan kota. Banyak alternatif *branding* yang dapat dipilih. Misalnya, menentukan *branding* Surabaya sebagai kota pendidikan. Dengan *branding* ini berarti pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi, harus dipersiapkan menjadi lembaga yang kredibel dan bermutu.

Berkaitan dengan mempersiapkan pendidikan bermutu, Surabaya juga berpeluang dijadikan kota vokasi. Jika ini yang dipilih maka pendidikan di Surabaya harus diarahkan untuk menyiapkan sumberdaya yang terampil. Usaha ini akan berhasil jika pemerintah mampu mesinergikan pendidikan dengan dunia usaha dan industri untuk menyiapkan sebanyak mungkin peluang kerja. *Branding* kota vokasi ini tentu sangat bermanfaat untuk mengurangi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Surabaya.

Branding lain yang dapat dipilih adalah kota wisata. Sejumlah sarana seperti, Jembatan Suramadu, Pantai Kenjeran, Kebun Binatang, Makam Sunan Ampel, Masjid al-Akbar, Tugu Pahlawan, berbagai situs sejarah, dan taman kota, jelas dapat dijadikan modal yang berharga. Apalagi di Surabaya tersedia layanan hotel berbintang, pusat perbelanjaan, makanan khas, fasilitas peribadatan, akses jalan raya, dan hutan kota yang dapat menjadi daya tarik. Yang perlu dipikirkan adalah membangun budaya masyarakat sehingga lebih ramah menyambut wisatawan.

Keunggulan manajemen tata pemerintahan yang efektif dan efisien juga dapat menjadi *branding*. Dengan semangat menerapkan reformasi birokrasi, para pejabat publik harus didorong untuk meningkatkan layanan. Jadikan Surabaya sebagai model layanan publik di segala bidang. Layanan birokrasi yang memuaskan pasti akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Para investor pun akan berdatangan jika layanan birokrasi memuaskan.

GOLPUT, PEMENANG PILGUB JATIM

Masyarakat Jawa Timur (Jatim) melaksanakan hajatan besar: pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung pada 23 Juli 2008. Pilgub Jatim diikuti lima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur: Khofifah Indar Parawansa-Mujiono (Kaji), Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR), Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam), Achmady-Suhartono (Achsan), dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).

Yang patut disyukuri, pesta demokrasi tersebut berlangsung sukses, aman, dan damai. Sebelumnya, masyarakat sempat khawatir karena yang bersaing dalam pilgub ini adalah tokoh yang memiliki basis massa yang fanatik. Apalagi, tiga kandidat adalah tokoh penting di organisasi NU, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan gesekan antarwarga nahdliyin. Ketiganya adalah Khofifah (ketua umum PP Muslimat), Ali Maschan Moesa (PW NU Jatim), dan Saifullah Yusuf (ketua umum PP GP Ansor). Belum termasuk Achmady yang didukung langsung Gus Dur.

Keberhasilan dalam menyelenggarakan pilgub ini menunjukkan masyarakat Jatim semakin dewasa dalam memahami demokrasi dan menyikapi perbedaan pilihan. Pilgub Jatim berlangsung sangat ketat dan menegangkan, terutama dilihat dari perolehan suara setiap pasangan calon. Perolehan suara pasangan calon, terutama Karsa, Kaji, SR, dan Salam, saling mengejar di basis daerah masing-masing.

Sementara itu, pasangan Achsan, sebagaimana diprediksi banyak pengamat, tidak mampu berbuat banyak, meski diusung PKB yang merupakan partai pemenang Pemilu 2004 di Jatim. Hal itu bisa dilihat dari hasil quick count sejumlah lembaga survei maupun hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Mayoritas lembaga survei menyatakan hasil quick count menunjukkan tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara hingga 30 persen. Begitu pula hasil penghitungan KPU Jatim. Karena itu, pilgub Jatim harus dilanjutkan ke putaran kedua, sebagaimana diatur dalam UU No 12/2008. Pilgub putaran kedua tersebut akan diikuti dua pasangan peraih suara terbanyak, Karsa dan Kaji.

KPUD Jatim pun mempersiapkan diri menyusun skenario pilgub putaran kedua. Pilgub putaran kedua harus dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan hasil pilgub putaran pertama. Itu berarti Karsa dan Kaji harus kembali berkampanye, meski dalam waktu singkat, untuk merebut simpati masyarakat Jatim.

Hasil putaran pertama pilgub Jatim juga memberikan pelajaran berharga pada partai-partai besar seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Ternyata, partai-partai tersebut, meski menunjukkan kekuatan pada Pemilu 2004, harus mengakui keunggulan figur yang lebih populer semacam Soekarwo dan Khofifah. Keduanya mampu mengungguli ketua partai dan tokoh-tokoh yang didukung partai mapan seperti Sutjipto (PDIP), Soenarjo (Golkar), dan Achmady (PKB).

Kemenangan Golput

Selain menempatkan Karsa dan Kaji sebagai dua pasangan peraih suara terbanyak, pesta demokrasi masyarakat Jatim menghadirkan fakta bahwa pemenang pilgub adalah golongan putih (golput). Hasil survei Lembaga Survei Indonesia menyatakan, tingkat partisipasi masyarakat Jatim mencapai 61,49 persen. Itu berarti angka golput mencapai 38,51 persen. Bahkan, hasil *quick count* Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mematok angka 42,28 persen untuk golput.

Fenomena golput memang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana pemilihan kepala daerah, baik di level kota/kabupaten maupun provinsi. Itu berarti KPU Jatim sebagai lembaga yang memiliki otoritas melaksanakan pilgub harus mengevaluasi kinerjanya agar angka golput tidak semakin tinggi.

Berkaitan dengan hal itu, KPU Jatim perlu lebih massif menyosialisasikan pilgub, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya. Salah satu cara yang bisa ditempuh KPU Jatim adalah memberikan kemudahan bagi warga urban un-

tuk bisa menggunakan hak pilih di tempat mereka bekerja. Jadi, untuk mencoblos, warga urban tidak harus pulang ke daerah asal.

Memang, banyak alasan yang dikemukakan orang, sehingga memilih golput. Misalnya, mereka merasa pilgub tidak bermanfaat karena tidak akan pernah mampu mengubah kehidupan jadi lebih baik. Juga, ada orang yang berpandangan bahwa pilgub dan pemilihan kepala daerah yang lain hanya menguntungkan calon penguasa dan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Sementara nasib kebanyakan orang tidak pernah terurus.

Ada juga alasan yang menunjukkan idealisme seseorang, sehingga memilih golput. Misalnya, mereka menyatakan tidak ada calon yang layak dipilih karena perbedaan ideologi, visi dan misi, serta masalah-masalah fundamental lain. Tentu, bersikap golput merupakan pilihan yang harus dihormati karena dilindungi Undang-undang. Tapi, yang harus selalu diingat, biaya pesta demokrasi ini ternyata sangat besar.

Menurut perhitungan KPU Jatim, untuk pilgub putaran pertama saja, dana yang dibutuhkan mencapai Rp 425 miliar. Anggaran yang demikian besar tentu sangat tidak sebanding dengan tingginya angka golput. Karena itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah, KPUD, serta berbagai elemen masyarakat adalah memberikan kesadaran mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Sebab, dana yang digunakan menggelar pilgub bersumber dari APBD yang sejatinya adalah uang rakyat.

Jika penganut golput berargumentasi bahwa tidak ada calon terbaik yang bisa dipilih, itu menjadi tantangan pasangan calon yang lolos ke putaran kedua. Itu berarti Karsa dan Kaji harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan masyarakat dengan mengusung program-program riil yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Penganut golput harus diyakinkan bahwa ada harapan hidup lebih baik dengan memilih salah satu di antara dua pasangan tersebut. Menggunakan hak pilih itu berarti memberikan harapan, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih pasti tidak memiliki harapan apa pun. Cara itu diharapkan bisa menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat Jatim dalam pilgub.

MAKNA PENGHAPUSAN NOMOR URUT CALEG

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan penting berkaitan dengan sistem pemilihan calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2009. Dalam amar keputusan MK dikatakan bahwa caleg terpilih akan ditentukan melalui mekanisme suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Putusan ini ditetapkan untuk merespon permohonan uji materiil yang dilakukan beberapa pihak yang berkeberatan dengan sistem nomor urut dalam menentukan lolos dan tidaknya caleg. Menurut tafsiran MK, mekanisme penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut seperti tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 214, bertentangan dengan substansi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Inti dari pasal 214 menyatakan bahwa caleg DPR, DPD, dan DPRD terpilih ditentukan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika calon yang memenuhi syarat melebihi jumlah kursi yang diperoleh partai politik (parpol) peserta pemilu, maka kursi akan diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil.

Ketentuan pasal 214 inilah yang dibatalkan MK dan mengganti dengan mekanisme penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Menurut UUD 1945 keputusan MK dikatakan sudah final. Artinya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan setelah MK memberikan keputusan. Hal ini berarti mekanisme penentuan caleg terpilih dalam pemilu 2009 harus

didasarkan pada perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut sebagaimana pemilu sebelumnya. Selanjutnya menjadi tugas KPU sebagai lembaga independen pelaksana pemilu untuk menjalankan amar keputusan MK ini.

Putusan MK tersebut jelas merupakan berkah bagi caleg yang ditempatkan di nomor besar oleh partainya. Sebab, peluang mereka menjadi legislator masih terbuka lebar asalkan mampu memperoleh suara terbanyak. Sebaliknya, bagi caleg yang bernomor kecil, keputusan MK dapat mengurangi ekspektasi untuk memudahkan jalan menjadi legislator.

Bahkan keputusan MK bisa menjadi musibah bagi caleg bernomor urut kecil. Sebab, diakui atau tidak, selama ini telah terjadi praktik jual-beli nomor urut yang dilakukan sebagian besar parpol. Hal ini berarti keputusan MK telah menyebabkan caleg yang terlanjur membeli nomor urut menjadi rugi besar. Drajat H. Wibowo, anggota DPR dari FPAN, mengibaratkan caleg yang memperoleh nomor kecil dengan cara membeli ini seperti sedang bermain saham yang harganya tiba-tiba anjlok akibat keputusan MK.

Keputusan MK juga memperkecil harapan caleg titipan pimpinan partai tingkat pusat, baik dengan pertimbangan politis maupun dikarenakan ada hubungan kekeluargaan. Mereka biasanya diberi nomor urut jadi di daerah pemilihan (dapil) yang gemuk dengan harapan agar lolos dengan mudah. Tetapi, dengan keputusan MK berarti caleg titipan partai harus bersaing ketat dengan caleg produk lokal.

Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah bagi caleg yang di-drop dari pusat meskipun mereka memiliki modal besar. Sebab, caleg produk lokal biasanya lebih populer karena telah lama bekerja dan membina konstituen di dapil-nya. Pada konteks inilah menarik diamati pertarungan caleg yang bermodal tetapi elitis *versus* caleg yang miskin modal tetapi populis.

Sebenarnya, putusan MK yang menekankan suara terbanyak sebagai mekanisme penentuan caleg terpilih telah ditetapkan secara internal oleh beberapa parpol. Sebut saja misalnya PAN, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Bahkan untuk menindaklanjuti kebijakan partai ini beberapa caleg telah melakukan perjanjian di depan notaris untuk tidak saling menggugat pasca pemilu.

Tetapi, keputusan internal partai ini masih sangat rawan dengan gugatan dari caleg, terutama mereka yang bernomor kecil tetapi tidak terpilih. Mereka berpeluang menggugat karena peraturan internal partai bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

Keputusan MK menurut UU tentang MK bersifat mengikat. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi parpol peserta pemilu kecuali menerima. Beberapa partai besar, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan PKS, telah menunjukkan komitmen untuk menerima keputusan MK. Persoalannya sekarang berpulang pada masing-masing caleg. Sebab, keputusan MK ini sekaligus mengharuskan setiap caleg bekerja lebih keras untuk mendekati diri dan mengenalkan visi misinya pada rakyat. Hanya dengan cara inilah caleg berpotensi terpilih karena mendapat dukungan mayoritas dari rakyat.

Terdapat pesimisme di kalangan pengamat dan praktisi politik terhadap putusan MK. Misalnya, dikatakan bahwa putusan MK hanya akan melapangkan jalan caleg yang bermodal besar. Modal dana yang besar jelas akan memungkinkan caleg memainkan kekuatannya dengan gencar berpromosi dan melakukan *money politics*. Sementara caleg dengan sumber dana terbatas memiliki peluang lebih kecil.

Tentu saja pemikiran ini tidak salah. Sebab, dana merupakan salah satu kekuatan yang dapat memainkan peran penting sehingga caleg dapat lebih dikenal rakyat. Tetapi, pengalaman dalam beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) menunjukkan dana sesungguhnya bukan satu-satunya variabel yang menentukan kesuksesan seseorang untuk terpilih. Ini berarti caleg yang kekurangan modal pun berpeluang terpilih asalkan mampu meyakinkan konstituen bahwa dirinya layak menjadi legislator.

Selain itu, kalangan politisi perempuan juga berkeberatan dengan keputusan MK. Mereka menganggap keputusan MK dapat menggembosi perjuangan kaum perempuan. Bahkan ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2008 sangat mungkin tidak tercapai. Sebab setiap caleg harus bertarung bebas, termasuk caleg perempuan, untuk mendapatkan suara terbanyak. Tetapi, inilah resiko pilihan menggunakan sistem demokrasi.

Dalam alam demokrasi kedaulatan rakyat harus dihargai. Seperti dikemukakan dalam beberapa referensi politik bahwa ada dua variabel penting dalam demokrasi, yakni keterlibatan rakyat (*participation*) dan persatuan dalam pemilihan (*contestation*). Justru di sinilah caleg perempuan akan diuji kualitas dan akseptabilitasnya. Jika mereka terpilih, maka pilihan itu bukan semata karena perbedaan biologis. Tetapi, dikarenakan kapasitasnya memang memadai untuk menjadi legislator.

Karena itulah keputusan MK dapat disebut sebagai pelajaran berharga bagi penanaman nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Sebab, substansi demokrasi yang sesungguhnya memang terletak pada kedaulatan rakyat. Maka menjadi aneh jika ada caleg dengan perolehan suara terbanyak tidak terpilih karena kebetulan bernomor urut besar. Sebaliknya, dapat dikatakan menipu rakyat jika ada caleg yang memperoleh suara lebih kecil terpilih karena bernomor urut kecil. Padahal penentuan nomor urut pasti dilakukan oleh parpol berdasarkan pertimbangan yang terkadang sangat politis.

Selain itu, keputusan MK juga membuka peluang yang seluas-luasnya bagi kader non-parpol yang memiliki basis kuat di akar rumput dengan kualifikasi moral dan akademis baik untuk menjadi legislator. Orang dengan tipologi seperti ini jelas tidak perlu antre berlama-lama karena telah memiliki modal sosial yang dibutuhkan politisi. Syarat yang perlu dilakukan adalah masuk menjadi anggota parpol sehingga berkesempatan dicalonkan sebagai caleg.

BANGUN KOALISI STRATEGIS, MENCARI FIGUR ALTERNATIF

Wacana membangun koalisi strategis untuk mendorong munculnya pemimpin baru yang lebih segar terus digelorkan banyak pihak. Beberapa strategi pun diwacanakan seperti anjuran agar partai politik (parpol) Islam dan parpol berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman bergabung menjadi satu kekuatan politik. Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menjadi salah satu tokoh yang sangat bersemangat menggagas koalisi strategis ini.

Ibarat bola salju, gagasan ini pun terus menggelinding dan memicu pro-kontra. Bagi yang setuju, koalisi strategis yang melibatkan partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman dianggap dapat menjadi kekuatan alternatif untuk bersaing dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Sementara kelompok yang menolak menyatakan bahwa wacana koalisi strategis yang didasarkan pada sentimen ideologis-agama dianggap tidak lagi relevan dan dapat menafikan kemajemukan bangsa. Bahkan wacana ini dianggap hanya akan melahirkan romantisme sejarah.

Secara taktis, koalisi strategis yang digagas beberapa pemikir dan politisi Muslim ini dimaksudkan untuk memecah kebuntuan sehingga dapat dimunculkan pemimpin alternatif di luar dua kandidat utama; SBY dan Mega. Sebab, sejauh ini rasanya baru kedua sosok ini saja yang benar-benar telah siap untuk bertarung dalam Pilpres 2009. Bahkan keduanya juga telah ditetapkan sebagai calon presiden (capres) oleh partai pendukungnya masing-masing.

Tidak ingin hanya ada dua figur yang bersaing, penggagas koalisi strategis berupaya melakukan penjajagan aliansi yang melibatkan beberapa partai Islam dan partai yang berbasis ormas keislaman. Koalisi strategis PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB, dinilai cukup prospektif untuk memunculkan capres alternatif. Pengalaman Pemilu 1999 dan 2004 menunjukkan perolehan suara partai-partai tersebut relatif stabil. Bahkan kalau dihitung perolehan suaranya mencapai 38 persen.

Sementara itu, Partai Hanura juga berencana membangun koalisi strategis pada Pemilu 2009. Koalisi ini akan melibatkan beberapa partai menengah. Target yang diinginkan juga sama, yaitu menemukan figur alternatif. Partai medioker seperti PPP, PBR, PAN, PKB, PKS, Hanura, dan Gerindra, dijadikan sebagai kekuatan utama. Berdasarkan kalkulasi politik kekuatan partai menengah ini dapat mencapai 35 persen.

Jika koalisi strategis yang digagas tokoh-tokoh partai Islam dan partai menengah tersebut solid, maka berarti telah melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu. Seperti diketahui, persyaratan yang ditetapkan UU Pemilu untuk pencalonan presiden dan wakil presiden adalah perolehan suara minimal 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional. Dengan demikian keinginan penggagas koalisi strategis untuk mengusung capres alternatif berarti bukan sesuatu yang mustahil dilakukan.

Keinginan membangun koalisi strategis juga dilakukan Dewan Integrasi Bangsa (DIB), ormas yang baru-baru ini mengadakan konvensi capres. Koalisi DIB ini dimotori oleh Sholahuddin Wahid (Gus Sholah). Oleh karena masih berbentuk ormas, maka koalisi DIB pun berencana menggandeng beberapa partai sebagai kendaraan politik. Bahkan dalam konvensi capres versi DIB ini turut berpartisipasi beberapa figur ternama yang sebelumnya telah mendeklarasikan diri sebagai capres seperti Sri Sultan HB X, Yuddy Chrisnandi, Fadel Muhammad, Marwah Daud Ibrahim, dan Rizal Ramli.

Pertanyaannya, seberapa besar peluang capres alternatif ini untuk menantang dua capres utama, SBY dan Mega? Jawabannya adalah seperti pernah dikemukakan Sunardi Rinakit, Koordinator Tim Pelangi Perubahan, yang kini menjadi Ketua Tim Sukses Sri Sultan HB X. Menurut Sunardi Rinakit, politik meru-

pakan ilmu yang bersifat *post factum* atau tidak dapat diprediksi. Artinya, semua kemungkinan dapat terjadi.

Apalagi dalam sistem Pilpres langsung di mana suara rakyat memegang peranan penting. Pengalaman pemilihan kepala daerah di beberapa tempat juga menunjukkan peranan partai politik tidak lagi menjadi kekuatan utama. Bahkan pilihan orang terhadap partai politik pun seringkali berbeda dengan pilihan figur calon kepala daerah. Hal ini berarti seseorang dapat memilih partai tertentu, tetapi tidak mendukung calon kepala daerah yang diusung partai tersebut.

Kekuatan Alternatif

Usaha beberapa pihak untuk membangun koalisi strategis sangat mungkin dapat menjadi kekuatan alternatif. Meski harus disadari bahwa dalam survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset menunjukkan popularitas SBY dan Mega masih menduduki posisi tertinggi. Tetapi, kemapanan posisi dua capres ini dapat terancam kalau capres alternatif terus bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan cara ini *rating* popularitas capres alternatif akan terus meningkat. Apalagi pengalaman politik juga menunjukkan bahwa perilaku politik (*political behaviour*) masyarakat selalu berubah dari waktu ke waktu. Kondisi ini jelas merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para penggagas koalisi strategis.

Tantangan bagi penggagas koalisi strategis terletak pada kemampuannya untuk melakukan manajemen konflik partai-partai politik pendukung. Sebab, sudah bukan menjadi rahasia lagi beberapa partai yang ada jelas memiliki agenda masing-masing. Tegasnya, setiap partai pasti memiliki kalkulasi politik. Apalagi dalam politik dikenal doktrin yang menyatakan bahwa politik adalah *who gets what, when, and how*. Pernyataan ini menjelaskan bahwa politik itu berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya.

Tantangan lebih berat akan dirasakan penggagas koalisi strategis ketika sudah sampai pada tahap penentuan nama capres dan cawapres alternatif. Tahap ini dapat dikatakan sebagai fase paling krusial. Pengalaman politik partai-partai Islam dan partai-partai berbasis ormas keislaman barangkali dapat dijadikan pela-

jaran. Partai-partai ini biasanya begitu mudah menyatukan visi dan misi dalam membangun masyarakat yang Islami, tetapi akan berpecah-belah menjadi beberapa kelompok ketika sudah sampai pada tahap menentukan *sharing* kekuasaan.

Peluang perpecahan kelompok yang tergabung dalam koalisi startegis ini akan semakin mendekati kenyataan apabila belum ditemukan figur yang dapat diterima semua kelompok. Padahal untuk sampai pada kesepakatan penentuan figur alternatif ini jelas membutuhkan proses yang panjang.

Persoalannya sekarang berpulang pada para penggagas koalisi strategis. Figur manakah yang representatif diusung menjadi capres alternatif. Apalagi saat ini telah tersedia beberapa figur yang potensial dijadikan capres alternatif. Sebut saja misalnya Jusuf Kalla (Golkar), Sri Sultan HB X (dicalonkan Partai Republikan), Hidayat Nur Wachid (PKS), Prabowo Subianto (Gerindra), Wiranto (Hanura), Sutiyoso (dicalonkan Partai Indonesia sejahtera), dan Din Syamsuddin (dicalonkan PMB). Jika mencermati keragaman latar belakang sosial, ideologi, dan politik beberapa tokoh ini rasanya penentuan figur alternatif yang disepakati tampaknya masih menjadi masalah besar bagi penggagas koalisi strategis.

Jika figur alternatif telah berhasil disepakati, langkah penting yang lain adalah mencari kendaraan politik. Dalam hal menentukan kendaraan politik ini yang perlu dipertimbangkan adalah membangun koalisi pelangi yang melibatkan sebanyak mungkin partai dari berbagai latar belakang ideologi. Persoalan ideologi politik ini tampaknya masih menjadi variabel yang penting dipertimbangkan dalam menentukan koalisi strategis.

Salah satu alternatif yang dapat dikemukakan adalah bahwa partai politik pendukung harus merepresentasikan gabungan ideologi nasionalis-religius. Politik representasi ideologi ini penting untuk menghindari tarik-menarik kepentingan ideologi yang masih menjadi kultur dalam sistem politik di Indonesia. Politik representasi kekuatan Jawa dan non-Jawa juga penting dipertimbangkan. Maka pada konteks inilah perlu dicari figur alternatif yang dapat merepresentasikan perpaduan kekuatan ideologi dan kepentingan pemerataan pembangunan.

Terakhir yang juga penting digarap penggagas koalisi strategis adalah menyiapkan program-program strategis dan pragmatis yang pro rakyat. Justru dalam aspek penyiapan program ini figur yang disepakati menjadi capres alternatif tidak boleh hanya berbekal cek kosong. Figur alternatif harus sudah menyiapkan *blue print* Indonesia lima tahun mendatang. Ini berarti para penggagas koalisi strategis perlu bekerja sama menentukan prioritas program yang akan ditawarkan. Kemasan tema kampanye yang lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Karena itu tema tentang penyediaan kebutuhan pokok yang murah, lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan, penting diutamakan.

Jika langkah ini dilakukan para penggagas koalisi strategis, rasanya kemunculan figur alternatif bukan sekedar berfungsi sebagai pemecah kebuntuan. Tetapi, lebih dari itu akan dapat menjadi kekuatan alternatif yang solutif untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini.